



# LAPORAN KINERJA

## SEKRETARIAT

**DIREKTORAT  
JENDERAL  
PERIKANAN  
TANGKAP**



**TRIWULAN I**

**2026**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Triwulan I Tahun 2026 disusun sebagai wujud nyata akuntabilitas dan transparansi publik. Selaku Unit Eselon II di Kementerian Kelautan dan Perikanan, penyusunan laporan ini diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2026 menjadi momentum krusial dalam agenda pembangunan kelautan dan perikanan, terutama dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan kebijakan strategis Ekonomi Biru Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam konteks tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berperan aktif untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sekaligus memastikan dukungan manajerial dan administratif bagi seluruh unit teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Sebagai bentuk nyata dukungan terhadap keberlanjutan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap bertekad untuk terus mengakselerasi kualitas pelayanan internal, mengefisienkan tata kelola, dan menguatkan pelaporan kinerja yang andal dan terukur. Kami memahami bahwa upaya mewujudkan kinerja yang unggul membutuhkan konsistensi, adaptasi terhadap dinamika kebijakan, serta kolaborasi antar unit organisasi.

Kami berharap Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Triwulan I Tahun 2026 ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat sekaligus masukan konstruktif bagi para pemangku kepentingan guna menyempurnakan kualitas kinerja organisasi di masa mendatang. Selamat membaca, semoga bermanfaat.

Jakarta, 17 April 2026  
Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap,



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

**Ridwan Mulyana**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2026 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 80.279.111.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2026 adalah sebesar Rp 32.769.043.602,- atau mencapai 40,82%. Berdasarkan pengukuran kinerja, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap mendapatkan total Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 102,99 dan masuk dalam kategori Baik.

Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada triwulan I tahun 2026 dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mempunyai 1 (satu) Sasaran Kegiatan dengan 21 Indikator Kinerja (IK) yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2026. Sasaran kegiatan, target indikator kinerja, dan capaian Setditjen Perikanan Tangkap triwulan I tahun 2026, yaitu:

| Sasaran Kegiatan |                                                                                            | Indikator Kinerja |                                                                                                   | Target TW I                   | Capaian TW I 2026 | Persentase |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
| 1                | Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap | 1                 | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                               | Periode Pengukuran Tahunan    |                   |            |
|                  |                                                                                            | 2                 | Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)                                      | Periode Pengukuran Semesteran |                   |            |
|                  |                                                                                            | 3                 | Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                                          | Periode Pengukuran Tahunan    |                   |            |
|                  |                                                                                            | 4                 | Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap (persen)     | Periode Pengukuran Tahunan    |                   |            |
|                  |                                                                                            | 5                 | Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                             | Periode Pengukuran Tahunan    |                   |            |
|                  |                                                                                            | 6                 | Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap (persen) | 77                            | 100               | 129,87     |
|                  |                                                                                            | 7                 | Persentase Pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap (persen)                                      | Periode Pengukuran Tahunan    |                   |            |
|                  |                                                                                            | 8                 | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap (persen)                              | Periode Pengukuran Tahunan    |                   |            |
|                  |                                                                                            | 9                 | Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang                                                          | 83                            | 85                | 102,41     |

| Sasaran Kegiatan |  | Indikator Kinerja | Target TW I                   | Capaian TW I 2026 | Persentase |
|------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
|                  |  |                   |                               |                   |            |
|                  |  | 10                | 86                            | 75                | 87,21      |
|                  |  | 11                | Periode Pengukuran Tahunan    |                   |            |
|                  |  | 12                | 88,8                          | 93,57             | 105,37     |
|                  |  | 13                | 100                           | 100               | 100        |
|                  |  | 14                | Periode Pengukuran Tahunan    |                   |            |
|                  |  | 15                | Periode Pengukuran Tahunan    |                   |            |
|                  |  | 16                | Periode Pengukuran Tahunan    |                   |            |
|                  |  | 17                | Periode Pengukuran Tahunan    |                   |            |
|                  |  | 18                | Periode Pengukuran Semesteran |                   |            |
|                  |  | 19                | Periode Pengukuran Tahunan    |                   |            |
|                  |  | 20                | Periode Pengukuran Tahunan    |                   |            |

| Sasaran Kegiatan |  | Indikator Kinerja |                                                                                                 | Target TW I                | Capaian TW I 2026 | Persentase |
|------------------|--|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|
|                  |  |                   | Perikanan Tangkap (nilai)                                                                       | Periode Pengukuran Tahunan |                   |            |
|                  |  | 21                | Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap (persen) |                            |                   |            |

## DAFTAR ISI

|                | URAIAN                                                                                                              | HALAMAN   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                | <b>KATA PENGANTAR</b>                                                                                               | <b>1</b>  |
|                | <b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>                                                                                          | <b>2</b>  |
|                | <b>DAFTAR ISI</b>                                                                                                   | <b>5</b>  |
|                | <b>DAFTAR GAMBAR</b>                                                                                                | <b>7</b>  |
|                | <b>DAFTAR TABEL</b>                                                                                                 | <b>8</b>  |
| <b>BAB I</b>   | <b>PENDAHULUAN</b>                                                                                                  | <b>10</b> |
| 1.1.           | Latar Belakang                                                                                                      | 10        |
| 1.2.           | Maksud dan Tujuan                                                                                                   | 11        |
| 1.3.           | Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi                                                                              | 11        |
| 1.4.           | Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja                                                                              | 12        |
| 1.5.           | Sistematika Penyajian Laporan Kinerja                                                                               | 13        |
| <b>BAB II</b>  | <b>PERENCANAAN KINERJA</b>                                                                                          | <b>15</b> |
| 2.1.           | Rencana Strategis                                                                                                   | 15        |
| 2.2.           | Sasaran, Indikator dan Target Kinerja                                                                               | 15        |
| 2.3.           | Rencana Aksi                                                                                                        | 16        |
| <b>BAB III</b> | <b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>                                                                                        | <b>18</b> |
| 3.1.           | Capaian Kinerja Sekretariat                                                                                         | 18        |
| 3.2.           | Analisis Capaian Kinerja                                                                                            | 20        |
| 3.2.1          | Sasaran Kegiatan: Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap                         | 20        |
| A              | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                                                 | 20        |
| B              | Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)                                                        | 22        |
| C              | Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                                                            | 23        |
| D              | Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap (persen)                       | 24        |
| E              | Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                                               | 24        |
| F              | Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)                   | 25        |
| G              | Persentase pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap (persen)                                                        | 26        |
| H              | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap                                                         | 27        |
| I              | Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap (persen)                                                 | 27        |
| J              | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap (persen) | 28        |

|                        |                                                                                                                      |           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| K                      | Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap (persen)              | 29        |
| L                      | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)                                                   | 30        |
| M                      | Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap (persen)                                               | 31        |
| N                      | Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap (persen) | 31        |
| O                      | Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)                                      | 32        |
| P                      | Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                                             | 33        |
| Q                      | Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                                                 | 33        |
| R                      | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                                        | 34        |
| S                      | Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                                                  | 35        |
| T                      | Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                                                        | 36        |
| U                      | Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)                      | 36        |
| 3.3.                   | Serapan Anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap                                                                | 37        |
| <b>BAB IV. PENUTUP</b> |                                                                                                                      | <b>38</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>        |                                                                                                                      | <b>39</b> |

## DAFTAR GAMBAR

| GAMBAR | URAIAN                                                                   | HALAMAN |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1      | Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2026      | 12      |
| 2      | Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2026       | 15      |
| 3      | <i>Dashboard</i> Aplikasi Kinerja Sekretariat DJPT triwulan I tahun 2026 | 18      |
| 4      | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Dalam Kurun Waktu Satu Tahun            | 30      |

## DAFTAR TABEL

| <b>Tabel</b> | <b>URAIAN</b>                                                                                                            | <b>HALAMAN</b> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1            | Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026                                                                    | 16             |
| 2            | Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DJPT triwulan I tahun 2026                                                         | 18             |
| 3            | Bobot Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)                                                                | 21             |
| 4            | Capaian IK “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap”                                                 | 21             |
| 5            | Capaian IK “Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap”                                                         | 22             |
| 6            | Capaian IK “Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap”                                                            | 23             |
| 7            | Capaian IK “Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap”                        | 24             |
| 8            | Capaian IK “Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap”                                               | 25             |
| 9            | Capaian IK “Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap”                    | 26             |
| 10           | Capaian IK “Persentase Pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap”                                                         | 26             |
| 11           | Capaian IK “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap”                                                 | 27             |
| 12           | Capaian IK “Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap”                                                  | 27             |
| 13           | Capaian IK “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap”  | 29             |
| 14           | Capaian IK “Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap”              | 29             |
| 15           | Capaian IK “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap”                                                   | 30             |
| 16           | Capaian IK “Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap”                                               | 31             |
| 17           | Capaian IK “Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap” | 32             |
| 18           | Capaian IK “Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap”                                      | 32             |
| 19           | Capaian IK “Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap”                                            | 33             |
| 20           | Capaian IK “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap”                                                | 34             |
| 21           | Capaian IK “Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap”                                             | 35             |
| 22           | Capaian IK “Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap”                                                 | 35             |
| 23           | Capaian IK “Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap”                                                       | 36             |

|    |                                                                                                     |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 24 | Capaian IK “Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap” | 37 |
| 25 | Alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja                                            | 37 |

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dianugerahi potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Dengan lebih dari 70% wilayahnya berupa perairan, Indonesia menyimpan kekayaan luar biasa di sektor maritim, termasuk di dalamnya industri perikanan tangkap. Namun demikian potensi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang masih tergolong rendah.

Dengan jumlah nelayan di laut dan perairan darat mencapai 2,6 juta orang yang tersebar di lebih dari 12.000 desa pesisir, subsektor perikanan tangkap diharapkan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus berperan strategis dalam mewujudkan Asta Cita kedua, yaitu kemandirian ekonomi melalui ketahanan dan swasembada pangan berbasis sumber daya laut. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara konsisten mengusung kebijakan Ekonomi Biru dengan salah satu fokus utama adalah implementasi program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota sebagai pilar utama pengelolaan perikanan yang sesuai dengan potensi sumber daya ikan di tiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Sejalan dengan upaya tersebut, akselerasi pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat pesisir juga terus digencarkan melalui pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih yang diharapkan mampu menata sentra nelayan menjadi lebih terpadu dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat pesisir.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan ini terus melakukan langkah-langkah percepatan guna mendorong peningkatan penerimaan dari sektor perikanan tangkap, peningkatan kesejahteraan nelayan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif. Seluruh upaya pembangunan tersebut dilaksanakan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk mendorong tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

Dalam konteks pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melalui Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap telah menjalankan perannya dalam memberikan dukungan teknis dan administratif bagi seluruh unit kerja. Terdapat 21 Indikator Kinerja yang menjadi komponen pencapaian pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Dalam memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target waktu, kualitas, kuantitas, dan sasaran, pelaporan kinerja dilakukan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas.

Seluruh proses ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja juga mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan Kinerja ini menjelaskan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja di tahun 2026. Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap senantiasa berkomitmen menjaga integritas pelaksanaan kinerja dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan berorientasi hasil.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap triwulan I tahun 2026 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap. Adapun tujuan penyusunan LKj Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap triwulan I tahun 2026 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap selama triwulan I tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan tangkap ke depan.

## **1.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

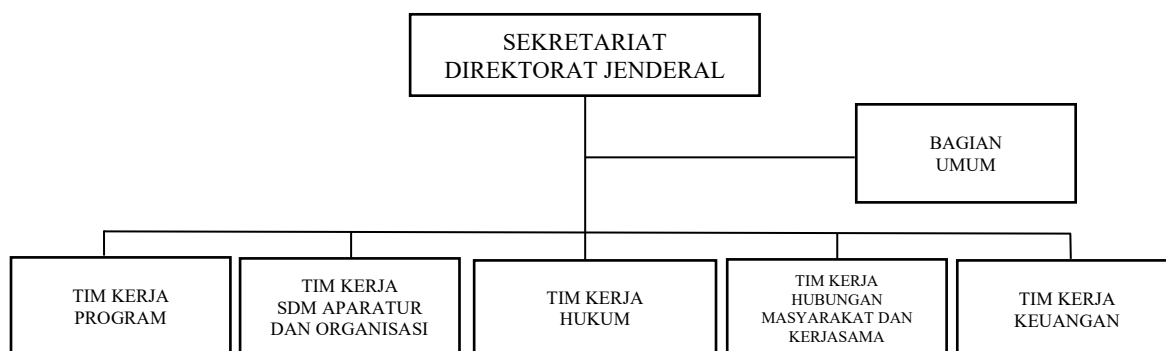
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
2. koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
3. koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
4. koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
5. koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
6. koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
7. koordinasi pengelolaan persuratan dan kearsipan serta rumah tangga dan perlengkapan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
8. koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
9. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; dan
10. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Adapun susunan organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap terdiri atas:

1. Bagian Umum
2. Tim Kerja Program;
3. Tim Kerja SDM Aparatur dan Organisasi;
4. Tim Kerja Hukum;
5. Tim Kerja Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama; dan
6. Tim Kerja Keuangan.

Susunan organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap tergambar pada bagan di bawah ini:



**Gambar 1.** Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2026

#### 1.4. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Sasaran kegiatan pembangunan perikanan tangkap yang ada di Sekretariat berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing IKU sebagai berikut:

1. Sasaran kegiatan **“Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap”** dengan indikator kinerja:
  - a. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
  - b. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)
  - c. Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
  - d. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
  - e. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
  - f. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
  - g. Persentase Pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
  - h. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
  - i. Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap (persen)
  - j. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
  - k. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
  - l. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)
  - m. Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap (persen)
  - n. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap (persen)

- o. Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
- p. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
- q. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
- r. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
- s. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
- t. Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
- u. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

### **1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap triwulan I tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **1. Ringkasan Eksekutif**

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala- kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada triwulan mendatang.

#### **2. Bab I Pendahuluan**

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

#### **3. Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.

#### **4. Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas – tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah- langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

6. Lampiran

Isi dari pada lampiran merupakan Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis

Kegiatan pembangunan sektor perikanan tangkap yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional. Potensi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap Indonesia masih sangat besar, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan Ekonomi Biru yang diusung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ditjen Perikanan Tangkap mengambil peran dalam kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang telah ditetapkan sebagai salah satu program utama. Program ini memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 yang merupakan aturan pelaksanaan dari peraturan tersebut. Selain kebijakan tersebut, Ditjen Perikanan Tangkap mengampu Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Mineral melalui program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut, pada tahun 2026 Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah menyusun berbagai indikator kinerja kegiatan dalam lingkup Dukungan Manajemen Internal, yang dirancang menunjang keberhasilan pelaksanaan program prioritas perikanan tangkap secara efektif dan akuntabel.

### 2.2. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh satker Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan. Sasaran program serta tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing IKU tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja berikut:

| KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN<br>DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP<br>JALAN MEDAN MENDAK, TIMOR 30008 14<br>JAKARTA 10110 (SACMEL, FAKUMLE (021) 5212172<br>TELEPON (021) 511079 (SACMEL, FAKUMLE (021) 5212172<br>LAMAR: <a href="mailto:info@dkp.go.id">info@dkp.go.id</a> / <a href="mailto:info@dkp.go.id">info@dkp.go.id</a> |                                                                                            |                                                                                                                             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026<br>SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP<br>DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                                             |        |
| NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SASARAN KEGIATAN                                                                           | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                  | TARGET |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap | 1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                                                      | 81,75  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | 2. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                                                              | 84,5   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | 3. Persentase Mendiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                                                                | 88,2   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | 4. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap (persen)                            | 82     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | 5. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                                                    | 3,8    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | 6. Persentase Rencana Umum Pengadaan PUJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)                        | 77     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | 7. Persentase Pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap (persen)                                                             | 82     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | 8. Tingkat Kepuasan Pengelompokan Data Ditjen Perikanan Tangkap (persen)                                                    | 90     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | 9. Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap (persen)                                                      | 83     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | 10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap (persen)     | 86     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | 11. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (BPH) RI atau LK Ditjen Perikanan Tangkap (persen)               | ≤ 0,5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | 12. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                                                       | 88,8   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | 13. Rasio Pemberian Positif dan Negatif Bidang Perikanan Tangkap (persen)                                                   | 100    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | 14. Persentase Penyelenggaraan Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap (persen) | 100    |

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda di bawah ini :

Nama : **Ridwan Mulyana**  
Jabatan : **Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Lotharia Latif**  
Jabatan : **Direktur Jenderal Perikanan Tangkap**

Selaku atas pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selanjutnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Januari 2026

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap  
*Lotharia Latif*

Pihak Pertama  
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap  
*Ridwan Mulyana*

| NO | SASARAN KEGIATAN                                                                                | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| 15 | Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)                 |                            | 100    |
| 16 | Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                        |                            | 78     |
| 17 | Nilai Pengawasan Keasraipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                           |                            | 81     |
| 18 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                   |                            | 92,10  |
| 19 | Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                             |                            | 92     |
| 20 | Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                                   |                            | 77     |
| 21 | Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap (persen) |                            | 68     |

Data Anggaran:

| NO                                                             | KEGIATAN                                                     | ANGGARAN (Rp)  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.                                                             | Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap | 80.461.956.000 |
| Total Anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2026 |                                                              | 80.461.956.000 |

Jakarta, 14 Januari 2026

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap  
*Lotharia Latif*

Pihak Pertama  
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap  
*Ridwan Mulyana*

**Gambar 2.** Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2026

### 2.3. Rencana Aksi

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulan/semester/tahun) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya-upaya tindak lanjut guna mengeliminasi permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU sebagaimana pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.** Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026

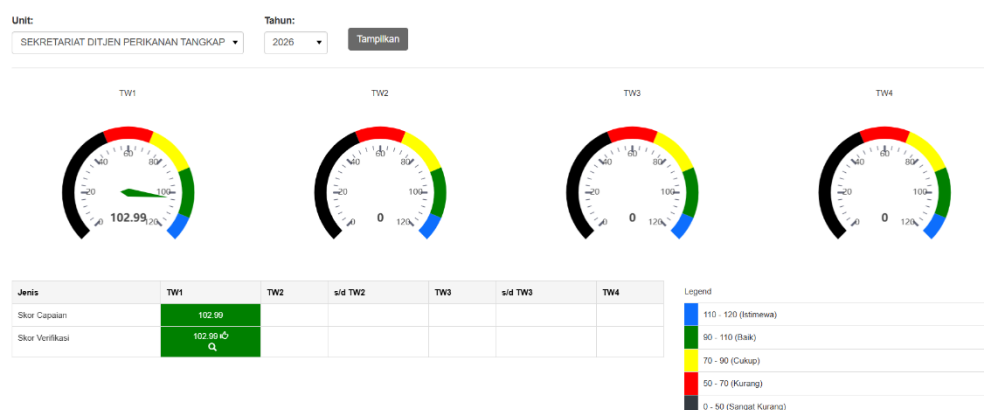
| SASARAN STRATEGIS                                                                          | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                                     | KEGIATAN PENDUKUNG                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap                                                 | Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran                                                           |
|                                                                                            | Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap                                                         | Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai                                                   |
|                                                                                            | Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap                                                            | Pengelolaan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap                                                       |
|                                                                                            | Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap                        | Optimalisasi Pelaksanaan Program Prioritas dan Efisiensi Biaya Operasional                                 |
|                                                                                            | Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap                                               | Reviu program dan kebijakan Ditjen Perikanan Tangkap                                                       |
|                                                                                            | Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap                    | Perencanaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap                                                           |
|                                                                                            | Persentase pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap                                                         | Penyelenggaraan dan sosialisasi ketentuan pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap                 |
|                                                                                            |                                                                                                             | Pemantauan dan evaluasi pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap                                   |
|                                                                                            | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap                                                 | Koordinasi Perencanaan pengelolaan data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap                         |
|                                                                                            |                                                                                                             | Penyelenggaraan, pengolahan dan validasi data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap                   |
|                                                                                            |                                                                                                             | Pemantauan dan evaluasi pengelolaan data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap                        |
|                                                                                            | Persentase Pelaksanaan Kerja sama bidang Perikanan Tangkap                                                  | Kerjasama Internasional dan antar lembaga (Pemerintah dan non pemerintah) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap |
|                                                                                            | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Ditjen Perikanan Tangkap  | Penyelesaian Dan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Lingkup DJPT                                   |
|                                                                                            | Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap              | Pendampingan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Lingkup DJPT                                                     |
|                                                                                            | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap                                                   | Survey dan Analisis Kualitas Layanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap                                      |
|                                                                                            | Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap                                               | Pengelolaan hubungan masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap                                           |
|                                                                                            | Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap | Penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap                                   |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                | KEGIATAN PENDUKUNG                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap                 | Pendampingan Hukum                                                                      |
|                   | Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap                       | Perencanaan Penyelenggaraan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Lingkup Ditjen Perikanan |
|                   | Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Tangkap                           | Perencanaan kearsipan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap                                  |
|                   | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap                  | Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran                     |
|                   | Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap                            | Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik                                    |
|                   | Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap                                  | Sinergi Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Integritas                               |
|                   | Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap | Penyusunan dan Penyempurnaan Proses Bisnis serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap           |

## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Sekretariat

Guna mencapai sasaran yang sudah ditetapkan maka diperlukan adanya indikator kinerja dan target kinerja yang kemudian dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja (PK). Pada dokumen PK Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap, terdapat 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 21 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung pencapaian kegiatan Sekretariat. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap memanfaatkan aplikasi Kinerjaku (<https://kinerjaku.kkp.go.id/>). Proses penghitungan kinerja mengacu pada manual IKU yang telah disusun, kemudian capaian kinerja dinilai dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Hasil pengukuran kinerja ini yang disampaikan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II. Berdasarkan PK, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan tampilan *dashboard* capaian Sekretariat triwulan I tahun 2026 seperti pada gambar berikut:



**Gambar 3.** *Dashboard* Aplikasi Kinerjaku Sekretariat DJPT triwulan I tahun 2026

Capaian kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada triwulan I tahun 2026 masuk dalam kategori “Baik”, hal ini ditandai dengan skor capaian kinerja sebesar 102,99%. Skor Capaian Kinerja ini merupakan hasil perhitungan dari 5 (lima) dari 21 (dua puluh satu) indikator kinerja yang telah diukur capaiannya sampai dengan triwulan I tahun 2026. Berdasarkan 5 indikator yang ada di triwulan I, 1 (satu) indikator kinerja masuk dalam kategori “Istimewa”. 3 (tiga) indikator kinerja masuk dalam kategori “Baik”, dan 1 (satu) indikator masuk dalam kategori “Cukup”.

Rekapitulasi capaian indikator kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada triwulan I tahun 2026 disusun pada tabel berikut:

**Tabel 2.** Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DJPT triwulan I tahun 2026

| Sasaran Kegiatan |                                                                                            | Indikator Kinerja |                                                                     | Target TW I                   | Capaian TW I 2026 | Persentase |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
| 1                | Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap | 1                 | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai) | Periode Pengukuran Tahunan    |                   |            |
|                  |                                                                                            | 2                 | Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)        | Periode Pengukuran Semesteran |                   |            |
|                  |                                                                                            | 3                 | Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen                                      | Periode Pengukuran Tahunan    |                   |            |

| Sasaran Kegiatan |  | Indikator Kinerja |                                                                                                                     | Target TW I                | Capaian TW I 2026 | Persentase |
|------------------|--|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|
|                  |  |                   | Perikanan Tangkap (nilai)                                                                                           | Periode Pengukuran Tahunan |                   |            |
|                  |  | 4                 | Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap (persen)                       |                            |                   |            |
|                  |  | 5                 | Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                                               | Periode Pengukuran Tahunan |                   |            |
|                  |  | 6                 | Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)                   | 77                         | 100               | 129,87     |
|                  |  | 7                 | Persentase Pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap (persen)                                                        | Periode Pengukuran Tahunan |                   |            |
|                  |  | 8                 | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap (persen)                                                | Periode Pengukuran Tahunan |                   |            |
|                  |  | 9                 | Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap (persen)                                                 | 83                         | 85                | 102,41     |
|                  |  | 10                | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap (persen) | 86                         | 75                | 87,21      |
|                  |  | 11                | Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap (persen)             | Periode Pengukuran Tahunan |                   |            |
|                  |  | 12                | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                                                   | 88,8                       | 93,57             | 105,37     |
|                  |  | 13                | Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap (persen)                                              | 100                        | 100               | 100        |
|                  |  | 14                | Persentase Penyelesaian Program Penyusunan                                                                          | Periode Pengukuran Tahunan |                   |            |

| Sasaran Kegiatan |  | Indikator Kinerja |                                                                                                 | Target TW I                   | Capaian TW I 2026 | Persentase |
|------------------|--|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
|                  |  |                   | Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap (persen)                       | Periode Pengukuran Tahunan    |                   |            |
|                  |  | 15                | Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)                 |                               |                   |            |
|                  |  | 16                | Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                        | Periode Pengukuran Tahunan    |                   |            |
|                  |  | 17                | Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                            | Periode Pengukuran Tahunan    |                   |            |
|                  |  | 18                | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                   | Periode Pengukuran Semesteran |                   |            |
|                  |  | 19                | Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                             | Periode Pengukuran Tahunan    |                   |            |
|                  |  | 20                | Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                                   | Periode Pengukuran Tahunan    |                   |            |
|                  |  | 21                | Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap (persen) | Periode Pengukuran Tahunan    |                   |            |

### 3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja untuk setiap perspektif sebagai berikut:

#### 3.2.1. Sasaran Kegiatan: Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap

##### A. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran, penilaian kinerja anggaran merupakan proses untuk menghasilkan nilai kinerja anggaran. Penilaian kinerja perencanaan anggaran untuk Kementerian/Lembaga dilakukan terhadap kinerja anggaran tingkat Satker, Unit Eselon I, dan Kementerian/Lembaga. Proses penilaian kinerja perencanaan anggaran dimulai dengan tahapan (1) pengukuran variabel kinerja perencanaan anggaran berdasarkan data

yang diperoleh dari aplikasi Monev Kementerian Keuangan dan dilanjutkan dengan (2) perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran pada setiap tingkatan. Adapun variabel kinerja perencanaan anggaran yang diukur, terdiri atas Variabel Efektivitas dan Variabel Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Unit Eselon I didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Indikator Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai Efisiensi Satker dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon I sebagai berikut:

**Tabel 3.** Bobot Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)

| Variabel                 | Uraian                               | Bobot (%) |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------|
| <b>Efektivitas (75%)</b> | 1. Capaian Indikator Kinerja Program | 30        |
|                          | 2. Nilai Efektivitas Satker          | 45        |
| <b>Efisiensi (25%)</b>   | 1. Nilai Efisiensi Satker            | 25        |

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Unit Eselon I, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dihitung dengan formula berikut:

$$NKPA_{UEI} = (CIKP \times WCIKP) + (NEf_{satker} \times WNEf_{satker}) + (NE_{satker} \times WNE_{satker})$$

Keterangan:

- NKPA UEI : Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I
- CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program
- NEf<sub>satker</sub> : Nilai Efektivitas Satker
- NE<sub>satker</sub> : Nilai Efisiensi Satker
- WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
- WNEf<sub>satker</sub> : Bobot Nilai Efektivitas Satker
- WNE<sub>satker</sub> : Bobot Nilai Efisiensi Satker

Terdapat 5 (lima) kategori pembagian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) yang disusun sebagai berikut:

- 1) Sangat Baik, apabila NKPA >90
- 2) Baik, apabila NKPA >80 - 90
- 3) Cukup, apabila NKPA >60 - 80
- 4) Kurang, apabila NKPA >50 - 60
- 5) Sangat Kurang, apabila NKPA ≤50

**Tabel 4.** Capaian IK “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap”

| Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap |           |           |           |           |                   |                            |                     |                                  |                             |                     |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| IK 1 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap                                             |           |           |           |           |                   |                            |                     |                                  |                             |                     |                                         |
| Realisasi TW I 2021-2025                                                                                     |           |           |           |           | Realisasi 2026    |                            |                     |                                  |                             | Renstra DJPT        |                                         |
| TW I 2021                                                                                                    | TW I 2022 | TW I 2023 | TW I 2024 | TW I 2025 | Target Tahun 2026 | Target TW I 2026           | Realisasi TW I 2026 | % Realisasi thd Target TW I 2026 | % Realisasi thd Target 2026 | Target Renstra 2029 | % Capaian TW I thd Target Akhir Renstra |
| -                                                                                                            | -         | -         | -         | -         | 81,75             | Periode Pengukuran Tahunan |                     |                                  |                             | 82,5                | -                                       |

Realisasi atas capaian indikator NKPA belum ada pada triwulan I tahun 2026 karena periode perhitungan indikator kinerja ini bersifat tahunan. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan Ditjen Perikanan Tangkap, khususnya Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap untuk memastikan target NKPA tercapai antara lain adalah:

- 1) koordinasi dengan seluruh Unit Kerja lingkup DJPT dalam pengisian capaian output hingga triwulan I;
- 2) evaluasi dan koordinasi pelaksanaan anggaran bersama dengan Biro Keuangan KKP; dan
- 3) menghimbau untuk melaksanakan realisasi kegiatan dan anggaran dengan memperhatikan pagu Standar Biaya Keluaran (SBK) agar nilai NKPA dapat tercapai lebih optimal.

## B. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Indeks Profesionalitas ASN meliputi dimensi sebagai berikut:

- a. Dimensi Kualifikasi, menggambarkan informasi kualifikasi pendidikan formal ASN dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;
- b. Dimensi Kompetensi, merupakan informasi yang menggambarkan riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, mulai dari diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis maupun seminar/workshop/magang/kursus;
- c. Dimensi Kinerja, menilai kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang berupa Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang menilai hasil kerja dan Perilaku Kerja Pegawai; dan
- d. Dimensi Disiplin, menunjukkan riwayat hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepada pegawai dalam periode 1 (satu) tahun.

**Tabel 5.** Capaian IK “Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap”

| Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap |           |                                                     |           |           |                   |                               |                     |                                  |                             |                     |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| IK 2                                                                                                         |           | Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap |           |           |                   |                               |                     |                                  |                             |                     |                                         |
| Realisasi TW I 2021-2025                                                                                     |           |                                                     |           |           | Realisasi 2026    |                               |                     |                                  |                             | Renstra DJPT        |                                         |
| TW I 2021                                                                                                    | TW I 2022 | TW I 2023                                           | TW I 2024 | TW I 2025 | Target Tahun 2026 | Target TW I 2026              | Realisasi TW I 2026 | % Realisasi thd Target TW I 2026 | % Realisasi thd Target 2026 | Target Renstra 2029 | % Capaian TW I thd Target Akhir Renstra |
| -                                                                                                            | -         | -                                                   | -         | -         | 84,5              | Periode Pengukuran Semesteran |                     |                                  |                             | 86                  | -                                       |

Realisasi atas capaian Indeks Profesionalitas ASN belum ada pada triwulan I tahun 2026 karena periode perhitungan indikator kinerja ini bersifat tahunan semesteran. Selama triwulan I tahun 2026 beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) penetapan Matriks Peran Hasil lingkup Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2026;
- 2) penyusunan dokumen rekomendasi tugas belajar dan izin belajar bagi PNS lingkup Ditjen Perikanan Tangkap;
- 3) pemantauan dan evaluasi kehadiran pegawai lingkup Ditjen Perikanan Tangkap;

### C. Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP.

**Tabel 6.** Capaian IK “Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap”

| Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap |           |           |           |           |                   |                            |                     |                                  |                             |                     |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| IK 3 Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap                                                        |           |           |           |           |                   |                            |                     |                                  |                             |                     |                                         |
| Realisasi TW I 2021-2025                                                                                     |           |           |           |           | Realisasi 2026    |                            |                     |                                  |                             | Renstra DJPT        |                                         |
| TW I 2021                                                                                                    | TW I 2022 | TW I 2023 | TW I 2024 | TW I 2025 | Target Tahun 2026 | Target TW I 2026           | Realisasi TW I 2026 | % Realisasi thd Target TW I 2026 | % Realisasi thd Target 2026 | Target Renstra 2029 | % Capaian TW I thd Target Akhir Renstra |
| -                                                                                                            | -         | -         | -         | -         | 88,2              | Periode Pengukuran Tahunan |                     |                                  |                             | 88,8                | -                                       |

Target capaian pada tahun 2026 sebesar 88.2, namun realisasi capaian Nilai SAKIP DJPT sampai dengan triwulan I tahun 2026 belum tersedia karena periode perhitungan perhitungan dilakukan secara tahunan, dan tentatif penilaian SAKIP DJPT akan dilaksanakan pada bulan Juli 2026 atau awal triwulan III tahun 2026 oleh Inspektorat Jenderal KKP. Selama triwulan I tahun 2026 beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain

- 1) pembahasan dan penetapan target indikator kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2026;
- 2) penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahun 2026;
- 3) penyiapan dokumen kinerja dalam rangka persiapan evaluasi SAKIP tahun 2026; dan
- 4) penyelesaian tindak lanjut evaluasi SAKIP KKP tahun 2025 bersama dengan Biro Perencanaan KKP.

Rencana aksi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan Nilai SAKIP yaitu:

- 1) melakukan perbaikan pengelolaan kinerja dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi;
- 2) meningkatkan peran serta UPT Pusat dalam pengelolaan kinerja lingkup DJPT;
- 3) melakukan pelaporan tepat waktu, dan melakukan reviu terhadap target maupun capaian yang tercapai ataupun tidak;
- 4) penyelarasan data dan informasi terkait dengan target atau capaian pada aplikasi kinerja sehingga dapat memberikan informasi yang lebih valid;
- 5) mengidentifikasi dan mendorong adanya inovasi dalam pengelolaan kinerja lingkup DJPT;

- 6) implementasi dari rencana aksi terhadap target yang belum tercapai.

#### D. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Indikator ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektifitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Kegiatan dikategorikan prioritas/strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- 1) memiliki dampak langsung kepada masyarakat;
- 2) memiliki anggaran besar;
- 3) mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
- 4) mendukung pencapaian prioritas nasional;
- 5) merupakan arahan direktif Presiden; dan
- 6) pertimbangan lainnya yang relevan.

**Tabel 7.** Capaian IK “Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap”

| Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap |           |           |           |           |                   |                            |                     |                                  |                             |                     |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| IK 4 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap                    |           |           |           |           |                   |                            |                     |                                  |                             |                     |                                         |
| Realisasi TW I 2021-2025                                                                                     |           |           |           |           | Realisasi 2026    |                            |                     |                                  |                             | Renstra DJPT        |                                         |
| TW I 2021                                                                                                    | TW I 2022 | TW I 2023 | TW I 2024 | TW I 2025 | Target Tahun 2026 | Target TW I 2026           | Realisasi TW I 2026 | % Realisasi thd Target TW I 2026 | % Realisasi thd Target 2026 | Target Renstra 2026 | % Capaian TW I thd Target Akhir Renstra |
| -                                                                                                            | -         | -         | -         | -         | 82                | Periode Pengukuran Tahunan |                     |                                  |                             | 85                  | -                                       |

Pengukuran tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Ditjen Perikanan Tangkap dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal KKP terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis di Ditjen Perikanan Tangkap yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1). Sampai dengan triwulan I tahun 2026, indikator kinerja ini belum dilakukan pengukuran.

#### E. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Penilaian maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP, yaitu: 1) Lingkungan Pengendalian, 2) Penilaian Risiko, 3) Kegiatan Pengendalian, 4) Informasi dan Komunikasi, dan 5) Pemantauan.

Level Maturitas SPIP terbagi dalam enam tingkatan, yaitu Level 0 (Belum Ada), Level 1 (Rintisan), Level2 (Berkembang), Level 3 (Terdefinisi), Level 4 (Terkelola dan Terukur), dan

Level 5 (Optimum). Hasil penilaian maturitas dikeluarkan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Mekanisme penilaian maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap terdiri atas:

- 1) Penilaian Mandiri (PM) oleh Ditjen Perikanan Tangkap; dan
- 2) Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP.

**Tabel 8.** Capaian IK “Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap”

| Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap |           |           |           |           |                   |                            |                     |                                  |                             |                     |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| IK 5 Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap                                           |           |           |           |           |                   |                            |                     |                                  |                             |                     |                                         |
| Realisasi TW I 2021-2025                                                                                     |           |           |           |           | Realisasi 2026    |                            |                     |                                  |                             | Renstra DJPT        |                                         |
| TW I 2021                                                                                                    | TW I 2022 | TW I 2023 | TW I 2024 | TW I 2025 | Target Tahun 2026 | Target TW I 2026           | Realisasi TW I 2026 | % Realisasi thd Target TW I 2026 | % Realisasi thd Target 2026 | Target Renstra 2026 | % Capaian TW I thd Target Akhir Renstra |
| -                                                                                                            | -         | -         | -         | -         | 3,6               | Periode Pengukuran Tahunan |                     |                                  |                             | 3,9                 | -                                       |

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, realisasi atas capaian indikator belum dapat diperoleh karena periode pengukuran indikator yang bersifat tahunan. Adapun kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung capaian indikator ini antara lain:

- 1) penyusunan peraturan terkait Satuan Tugas SPIP tahun 2026;
- 2) penyusunan dan pelaporan SPIP secara berkala (bulanan); dan
- 3) penyusunan, rekapitulasi, serta pemantauan Manajemen Risiko.

#### **F. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)**

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa (PBJ). Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Perhitungan dari indikator kinerja ini didapatkan dari formula berikut:

$$\text{Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SiRUP} = \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam SiRUP dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan.

**Tabel 9.** Capaian IK “Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap”

| Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap |           |           |           |           |                   |                  |                     |                                  |                             |                     |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| IK 6 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap                |           |           |           |           |                   |                  |                     |                                  |                             |                     |                                         |
| Realisasi TW I 2021-2025                                                                                     |           |           |           |           | Realisasi 2026    |                  |                     |                                  |                             | Renstra DJPT        |                                         |
| TW I 2021                                                                                                    | TW I 2022 | TW I 2023 | TW I 2024 | TW I 2025 | Target Tahun 2026 | Target TW I 2026 | Realisasi TW I 2026 | % Realisasi thd Target TW I 2026 | % Realisasi thd Target 2026 | Target Renstra 2026 | % Capaian TW I thd Target Akhir Renstra |
| -                                                                                                            | -         | -         | -         | 99,97     | 77                | 77               | 100                 | 129,87                           | 129,87                      | 80                  | 125                                     |

Setelah dilakukan kompilasi dan rekapitulasi data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa KKP sampai dengan waktu cut-off data untuk perhitungan persentase RUP Terumumkan pada tanggal 7 April 2026, secara keseluruhan satuan kerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap telah mencapai 100% sehingga persentase capaian terhadap target diperoleh 129,87%.

#### G. Persentase pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan, permasalahan, atau bahkan temuan berulang dari aparat pengawasan internal maupun eksternal.

Indikator kinerja persentase pengelolaan BMN merupakan suatu pengukuran yang menggambarkan Pengelolaan BMN yang optimal dan dikelola Ditjen Perikanan Tangkap yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku. Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur, yaitu:

- 1) Dokumen Rencana Kebutuhan BMN (RK BMN) tahun 2026;
- 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN;
- 3) Tersedianya usulan penghapusan BMN (kondisi rusak berat);
- 4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2025; dan
- 5) Penyusunan/penyampaian laporan BMN secara tepat waktu.

**Tabel 10.** Capaian IK “Persentase Pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap”

| Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap |           |           |           |           |                   |                            |                     |                                  |                             |                     |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| IK 7 Persentase Pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap                                                     |           |           |           |           |                   |                            |                     |                                  |                             |                     |                                         |
| Realisasi TW I 2021-2025                                                                                     |           |           |           |           | Realisasi 2026    |                            |                     |                                  |                             | Renstra DJPT        |                                         |
| TW I 2021                                                                                                    | TW I 2022 | TW I 2023 | TW I 2024 | TW I 2025 | Target Tahun 2026 | Target TW I 2026           | Realisasi TW I 2026 | % Realisasi thd Target TW I 2026 | % Realisasi thd Target 2026 | Target Renstra 2026 | % Capaian TW I thd Target Akhir Renstra |
| -                                                                                                            | -         | -         | -         | -         | 82                | Periode Pengukuran Tahunan |                     |                                  |                             | 85                  | -                                       |

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, capaian indikator ini belum dapat diperoleh karena periode pengukuran indikator yang bersifat tahunan. Telah disusun laporan perkembangan pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2025 sebagai upaya mendukung pencapaian indikator kinerja triwulan ini.

## H. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (TKPD) adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Ditjen Perikanan Tangkap sampai dengan Validasi Nasional. Data diambil dari pengisian kuesioner secara *sampling*, yang diisi oleh petugas Pengelola Data Bidang Perikanan Tangkap di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah pelaku usaha yang telah terdaftar pada tahun sebelumnya.

Kategori hasil penilaian TKPD terbagi menjadi 4, yaitu Tidak Patuh (0% - 25,9%), Cukup Patuh (26% - 50,9%), Patuh (51% - 75,9%), dan Sangat Patuh (76% - 100%). Dalam menentukan parameter termasuk ke dalam kategori di atas, terdapat 3 (tiga) variabel perhitungan, yaitu: 1) Persentase Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Terintegrasi ( $X_1$ ) dengan bobot nilai 30%; 2) Persentase Data Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tervalidasi ( $X_2$ ) dengan bobot nilai 40%; 3) Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi ( $X_3$ ) dengan bobot nilai 30%. Sehingga perhitungan indikator kinerja ini dirumuskan dalam formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase TKPD} = X_1 + X_2 + X_3$$

**Tabel 11.** Capaian IK “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap”

| Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap |           |           |           |           |                   |                            |                     |                                  |                             |                     |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| IK 8 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap                                             |           |           |           |           |                   |                            |                     |                                  |                             |                     |                                         |
| Realisasi TW I 2021-2025                                                                                     |           |           |           |           | Realisasi 2025    |                            |                     |                                  |                             | Renstra DJPT        |                                         |
| TW I 2021                                                                                                    | TW I 2022 | TW I 2023 | TW I 2024 | TW I 2025 | Target Tahun 2026 | Target TW I 2026           | Realisasi TW I 2026 | % Realisasi thd Target TW I 2026 | % Realisasi thd Target 2026 | Target Renstra 2029 | % Capaian TW I thd Target Akhir Renstra |
| -                                                                                                            | -         | -         | -         | -         | 90                | Periode Pengukuran Tahunan |                     |                                  |                             | 90                  | -                                       |

Sampai dengan triwulan I Tahun 2026, capaian indikator ini belum dapat diperoleh karena periode pengukuran indikator yang bersifat tahunan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung capaian indikator kinerja ini antara lain:

- 1) pengolahan dan visualisasi data produksi perikanan tangkap;
- 2) pengolahan data validasi data statistik perikanan tangkap tahun 2025; dan
- 3) pengolahan data e-PIT dan PIPP dalam mendukung pengolahan data statistik perikanan tangkap di perairan laut.

## I. Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap (persen)

Persentase implementasi kerja sama antara KKP dan mitra merupakan persentase capaian pelaksanaan kegiatan Kerja Sama berupa *Output* dan *Outcome*, sesuai dengan perencanaan kegiatan yang tertuang dalam matriks Rencana Aksi dari Perjanjian Kerja Sama (PKS). Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan pengukuran capaian implementasi *Memorandum of Understanding* (MoU) dan pengukuran capaian implementasi PKS.

**Tabel 12.** Capaian IK “Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap”

| Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap |           |           |           |           |                   |                  |                     |                        |                             |                     |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|
| IK 9 Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap                                              |           |           |           |           |                   |                  |                     |                        |                             |                     |                           |
| Realisasi TW I 2021-2025                                                                                     |           |           |           |           | Realisasi 2026    |                  |                     |                        |                             | Renstra DJPT        |                           |
| TW I 2021                                                                                                    | TW I 2022 | TW I 2023 | TW I 2024 | TW I 2025 | Target Tahun 2026 | Target TW I 2026 | Realisasi TW I 2026 | % Realisasi thd Target | % Realisasi thd Target 2026 | Target Renstra 2029 | % Capaian TW I thd Target |

|   |   |   |   |    |    |    |    |              |        |    |                  |
|---|---|---|---|----|----|----|----|--------------|--------|----|------------------|
|   |   |   |   |    |    |    |    | TW I<br>2026 |        |    | Akhir<br>Renstra |
| - | - | - | - | 81 | 83 | 83 | 85 | 102,41       | 102,41 | 86 | 98,84            |

Kerja sama antarlembaga pada triwulan I tahun 2026 meliputi kerja sama dengan instansi pemerintah dan dengan instansi non-pemerintah antara lain:

- 1) Ditjen Binapenta dan PKK, Kementerian Ketenagakerjaan
- 2) Ditjen Binwasnaker, Kementerian Ketenagakerjaan
- 3) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- 4) Deputi Bidang Perkoperasian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 5) Direktorat Pengamanan Objek Vital Korsabhara Baharkam Polri
- 6) BPJS Ketenagakerjaan;
- 7) PT Moores Rowland Bali dba Starling Resources;
- 8) WWF Indonesia;
- 9) Yayasan IPNLF Indonesia
- 10) Yayasan Konservasi Alam Nusantara
- 11) Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia
- 12) Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia;
- 13) Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia
- 14) PT Pertamina Patra Niaga
- 15) Yayasan Pesisir Lestari
- 16) Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara
- 17) Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia
- 18) PT Jaring Aruna Dagang Indonesia
- 19) Institut Teknologi Kelautan Buton
- 20) FPIK Institut Pertanian Bogor
- 21) FPIK Universitas Brawijaya
- 22) FPIK Universitas Diponegoro
- 23) FPIK Universitas Padjadjaran
- 24) FPIK Universitas Jenderal Soedirman
- 25) FIKP Universitas Hasanuddin
- 26) FPIK Universitas Halu Oleo
- 27) FKP Universitas Syiah Kuala
- 28) FPIK Universitas Pancasila.

Daftar tersebut merupakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemerintah sebanyak 5 (lima) lembaga dan Non Pemerintah sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembaga. Secara keseluruhan terdapat 111 ruang lingkup kerja sama dari 28 lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah. Realisasi IKU persentase implementasi kerja sama tersebut diperoleh dari rasio antara jumlah ruang lingkup dengan jumlah mitra dan dikali 100% sehingga diperoleh capaian sebesar 85%.

#### **J. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap (persen)**

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen kepada Ditjen Perikanan Tangkap

berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi; yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan. Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 s.d. 31 Desember 2025 (triwulan IV tahun 2025) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh Ditjen Perikanan Tangkap sampai dengan 31 Maret Tahun 2026 (triwulan I tahun 2026).

**Tabel 13.** Capaian IK “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap”

| Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap     |           |           |           |           |                   |                  |                     |                                  |                             |                     |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| IK 10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap |           |           |           |           |                   |                  |                     |                                  |                             |                     |                                         |
| Realisasi TW I 2021-2025                                                                                         |           |           |           |           | Realisasi 2026    |                  |                     |                                  |                             | Renstra DJPT        |                                         |
| TW I 2021                                                                                                        | TW I 2022 | TW I 2023 | TW I 2024 | TW I 2025 | Target Tahun 2026 | Target TW I 2026 | Realisasi TW I 2026 | % Realisasi thd Target TW I 2026 | % Realisasi thd Target 2026 | Target Renstra 2029 | % Capaian TW I thd Target Akhir Renstra |
| 71,70                                                                                                            | 63,93     | 76,03     | 83,63     | 72,88     | 86                | 86               | 75                  | 87,21                            | 85,74                       | 89                  | 84,27                                   |

Capaian persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti triwulan I tahun 2026 sebesar 75,00 % (tuntas 63 dari 84 rekomendasi). Capaian tersebut masih dibawah target dikarenakan masih terdapat 21 rekomendasi pada satker Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang belum tuntas sampai dengan akhir triwulan I tahun 2026. Sebagai upaya perbaikan di triwulan mendatang, perlu dilakukan langkah-langkah strategis agar semua rekomendasi yang disampaikan dapat tuntas ditindaklanjuti secara tepat waktu dengan langkah berikut:

- 1) koordinasi dengan unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam rangka pemantauan untuk melengkapi tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan sampai tuntas; dan
- 2) koordinasi yang intensif dengan Inspektorat Jenderal khususnya Inspektorat II sebagai mitra DJPT untuk bersama-sama menindaklanjuti rekomendasi sampai selesai.

#### K. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Persentase batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen Perikanan Tangkap merupakan informasi penyelesaian temuan yang disajikan dalam laporan tindak lanjut atas temuan LHP BPK berdasarkan pada empat kriteria, yakni: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

**Tabel 14.** Capaian IK “Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap”

| Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap |           |           |           |           |                   |                            |                     |                                  |                             |                     |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| IK 11 Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap         |           |           |           |           |                   |                            |                     |                                  |                             |                     |                                         |
| Realisasi TW I Tahun 2021-2025                                                                               |           |           |           |           | Realisasi 2026    |                            |                     |                                  |                             | Renstra DJPT        |                                         |
| TW I 2021                                                                                                    | TW I 2022 | TW I 2023 | TW I 2024 | TW I 2025 | Target Tahun 2026 | Target TW I 2026           | Realisasi TW I 2026 | % Realisasi thd Target TW I 2026 | % Realisasi thd Target 2026 | Target Renstra 2029 | % Capaian TW I thd Target Akhir Renstra |
| -                                                                                                            | -         | -         | -         | -         | ≤ 0,5             | Periode Pengukuran Tahunan |                     |                                  | ≤ 0,5                       | -                   | -                                       |

Capaian indikator ini diukur dari besarnya persentase nilai temuan LHP BPK Atas LK Ditjen Perikanan Tangkap dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran DJPT TA 2025 dengan target  $\leq 0,5$ . Sampai dengan triwulan I Tahun 2026, capaian indikator ini belum dapat diperoleh karena periode pengukuran indikator yang bersifat tahunan dan hasil audit oleh BPK RI belum selesai dilaksanakan.

#### L. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)

Salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Survei Kepuasan Masyarakat mengukur secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik berdasarkan unsur-unsur yang menjadi indikator pengukuran sebagai berikut: U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas, U7 Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas, U8 Layanan Konsultasi, dan U9 Kualitas Isi/Sarana Prasarana.

**Tabel 15.** Capaian IK “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap”

| Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap |           |           |           |           |                   |                  |                     |                                  |                             |                     |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| IK 12 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap                                              |           |           |           |           |                   |                  |                     |                                  |                             |                     |                                         |
| Realisasi TW I 2021-2025                                                                                     |           |           |           |           | Realisasi 2025    |                  |                     |                                  |                             | Renstra DJPT        |                                         |
| TW I 2021                                                                                                    | TW I 2022 | TW I 2023 | TW I 2024 | TW I 2025 | Target Tahun 2026 | Target TW I 2026 | Realisasi TW I 2026 | % Realisasi thd Target TW I 2026 | % Realisasi thd Target 2026 | Target Renstra 2029 | % Capaian TW I thd Target Akhir Renstra |
| -                                                                                                            | 86,22     | 88,69     | 89,89     | 91,70     | 88,8              | 88,8             | 93,57               | 105,37                           | 105,37                      | 89,5                | 104,55                                  |

Validasi SKM dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap selaku admin eselon I dan Pusdatin selaku super admin pada Tools SKM KKP. Capaian nilai hasil SKM Triwulan I tahun 2026 untuk DJPT yang terdiri atas 26 Unit Pelayanan Publik (UPP). Jumlah responden sebanyak 4.088 dengan nilai SKM sebesar 93,57 kategori mutu pelayanan A. Terdapat kenaikan nilai sebesar 1,15 apabila dibandingkan dengan nilai SKM Triwulan IV tahun 2025 seperti yang tergambar pada grafik di bawah.



**Gambar 4.** Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Dalam Kurun Waktu Satu Tahun

Jumlah layanan yang dilaksanakan sebanyak 41 berdasarkan Kepmen KP Nomor 20 Tahun 2025. Seluruh unsur pelayanan mendapatkan nilai lebih dari 3 (tiga) dengan nilai rata-rata 3,74. Berdasarkan hasil validasi SKM, terdapat 3 unsur terendah yaitu U6 Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas yang memiliki nilai sebesar 3,717, U8 Layanan Konsultasi yang memiliki nilai sebesar 3,717, dan U9 Kualitas Isi/Sarana yang memiliki

nilai 3,705. Upaya yang dapat dilakukan oleh UPP untuk dijadikan rencana tindak lanjut atas unsur terendah tersebut antara lain dengan memberikan sosialisasi terkait waktu pemberian layanan, meningkatkan waktu respon petugas dalam melaksanakan pelayanan dengan memberikan *in-house training*, melakukan sosialisasi di berbagai media terkait fasilitas konsultasi dan pengaduan, serta melakukan perbaikan/peningkatan aplikasi dan/atau sarana prasarana yang mendukung pelayanan publik di masing-masing UPP.

#### M. Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap (persen)

Jumlah pemberitaan sektor kelautan dan perikanan yang dimuat pada media massa baik lokal, nasional maupun internasional yang memiliki *tone* atau nuansa netral dan positif dibandingkan jumlah seluruh berita. Perhitungan indikator ini berasal dari rekapitulasi banyak berita yang bersumber dari media daring (*online*) dan media cetak selama satu triwulan di tahun 2026 yang mengandung substansi kebijakan terhadap sektor kelautan dan perikanan di bidang perikanan tangkap dan digabungkan dijumlahkan dengan banyak berita yang mengandung substansi kebijakan bersifat positif kemudian dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pemberitaan terkait sektor kelautan dan perikanan di bidang perikanan tangkap kemudian dikalikan seratus persen untuk mendapatkan persentase rasio pemberitaan positif dan netral lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

**Tabel 16.** Capaian IK “Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap”

| Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap |           |           |           |           |                   |                  |                     |                                  |                             |                     |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| IK 13 Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap                                          |           |           |           |           |                   |                  |                     |                                  |                             |                     |                                         |
| Realisasi TW I 2021-2025                                                                                     |           |           |           |           | Realisasi 2025    |                  |                     |                                  |                             | Renstra DJPT        |                                         |
| TW I 2021                                                                                                    | TW I 2022 | TW I 2023 | TW I 2024 | TW I 2025 | Target Tahun 2026 | Target TW I 2026 | Realisasi TW I 2026 | % Realisasi thd Target TW I 2026 | % Realisasi thd Target 2026 | Target Renstra 2029 | % Capaian TW I thd Target Akhir Renstra |
| -                                                                                                            | -         | -         | 100       | 100       | 100               | 100              | 100                 | 100                              | 100                         | 100                 | 100                                     |

Jumlah pemberitaan positif dan netral di media massa (cetak, online, dan elektronik) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap triwulan I (Januari - Maret) tahun 2026 sebanyak 837 berita, yang terdiri dari 474 pemberitaan positif, 363 pemberitaan netral, dan 0 pemberitaan negatif. Adapun pemberitaan yang dominan sepanjang triwulan I terkait, (1) Program KNMP Siap Perkuat Ketahanan Pangan hingga Ekonomi, (2) KKP Dukung Pemda DKI Urai Kepadatan Kapal Perikanan di Muara Angke (3) Percontohan Pelabuhan PIT di Maluku, (4) Presiden Prabowo Bangun 1.582 Kapal Nelayan, Serap 600 Ribu Tenaga Kerja. Berdasarkan data di atas, maka realisasi indikator kinerja Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap triwulan I tahun 2026 tercapai 100%.

#### N. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap (persen)

Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap adalah salah satu dari dua indikator kinerja yang menjadi target kinerja Tim Kerja Hukum Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2026. Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan KKP pada tahun 2026 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 82 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026.

Mengacu pada Keputusan Menteri KP Nomor 82 Tahun 2025, terdapat 3 (tiga) peraturan di mana Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menjadi inisiator, yaitu:

- 1) Keputusan Menteri tentang Penetapan/Peningkatan Kelas Pelabuhan Perikanan;
- 2) Keputusan Menteri tentang Rencana Pengelolaan Perikanan; dan
- 3) Keputusan Menteri tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan.

**Tabel 17.** Capaian IK “Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap”

| Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap      |           |           |           |           |                   |                            |                     |                                  |                             |                     |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| IK 14 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap |           |           |           |           |                   |                            |                     |                                  |                             |                     |                                         |
| Realisasi TW I Tahun 2021-2025                                                                                    |           |           |           |           | Realisasi 2026    |                            |                     |                                  |                             | Renstra DJPT        |                                         |
| TW I 2021                                                                                                         | TW I 2022 | TW I 2023 | TW I 2024 | TW I 2025 | Target Tahun 2026 | Target TW I 2026           | Realisasi TW I 2026 | % Realisasi thd Target TW I 2026 | % Realisasi thd Target 2026 | Target Renstra 2029 | % Capaian TW I thd Target Akhir Renstra |
| -                                                                                                                 | -         | -         | -         | -         | 100               | Periode Pengukuran Tahunan |                     |                                  |                             | 100                 | -                                       |

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, realisasi atas capaian indikator belum dapat diperoleh karena periode pengukuran indikator yang bersifat tahunan. Adapun kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung capaian indikator ini antara lain:

- 1) konsultasi publik terkait Rencana Pengelolaan Perikanan Gurita;
- 2) rapat koordinasi terkait penyusunan Rancangan Pengelolaan Perikanan WPPNRI 712 dan WPPNRI 572; dan
- 3) pembahasan awal dengan Direktorat teknis terkait penetapan/peningkatan kelas pelabuhan perikanan.

#### O. Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Penyelesaian masalah hukum adalah salah satu dari dua indikator kinerja yang menjadi target kinerja bagian hukum Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2026. Definisi masalah hukum dalam indikator kinerja ini merupakan masalah yang timbul terkait pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Penyelesaian masalah hukum dilakukan melalui advokasi hukum yang berupa serangkaian tindakan pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan pemberian pembinaan hukum.

**Tabel 18.** Capaian IK “Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap”

| Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap |           |           |           |           |                   |                            |                     |                                  |                             |                     |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| IK 15 Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap                                 |           |           |           |           |                   |                            |                     |                                  |                             |                     |                                         |
| Realisasi TW I Tahun 2021-2025                                                                               |           |           |           |           | Realisasi 2026    |                            |                     |                                  |                             | Renstra DJPT        |                                         |
| TW I 2021                                                                                                    | TW I 2022 | TW I 2023 | TW I 2024 | TW I 2025 | Target Tahun 2026 | Target TW I 2026           | Realisasi TW I 2026 | % Realisasi thd Target TW I 2026 | % Realisasi thd Target 2026 | Target Renstra 2029 | % Capaian TW I thd Target Akhir Renstra |
| -                                                                                                            | -         | -         | -         | -         | 100               | Periode Pengukuran Tahunan |                     |                                  |                             | 100                 | -                                       |

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, realisasi atas capaian indikator belum dapat diperoleh karena periode pengukuran indikator yang bersifat tahunan. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja di triwulan ini antara lain:

- 1) Pendampingan Dugaan Praktik Niaga dan Distribusi BBM Solar Industri Illegal di Kabupaten Banyuwangi;
- 2) Rapat pembahasan Rencana Pengalihan Barang Milik Negara Kapal Bantuan Kalamo Wangi 01 dan Penghapusan Barang Milik Negara Kalamo Wangi 02; dan
- 3) Penyiapan Konsep Jawaban Permohonan Hak Uji Materiil Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur yang telah disampaikan dan diterima oleh Mahkamah Agung.

#### P. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Inovasi dalam pelayanan publik merupakan aspek krusial dalam perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, serta pencapaian kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Proposal inovasi adalah dokumen berisi informasi mengenai inovasi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh penyelenggara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. IKU Inovasi Pelayanan Publik yang menjadi *mandatory* di Lingkungan KKP, dengan Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik ada di Level I. Tim Penilai Eselon I akan menyampaikan proposal inovasi kepada Tim Penilai Internal KKP. Proposal inovasi yang masuk kedalam berita acara tim penilai internal KKP memiliki target nilai minimum 78.

**Tabel 19.** Capaian IK “Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap”

| Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap |              |              |              |              |                         |                            |                           |                                                 |                                         |                           |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| IK 16 Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap                                       |              |              |              |              |                         |                            |                           |                                                 |                                         |                           |                                                           |
| Realisasi TW I Tahun 2021-2025                                                                               |              |              |              |              | Realisasi 2026          |                            |                           |                                                 |                                         | Renstra DJPT              |                                                           |
| TW I<br>2021                                                                                                 | TW I<br>2022 | TW I<br>2023 | TW I<br>2024 | TW I<br>2025 | Target<br>Tahun<br>2026 | Target<br>TW I<br>2026     | Realisasi<br>TW I<br>2026 | %<br>Realisasi<br>thd<br>Target<br>TW I<br>2026 | %<br>Realisasi<br>thd<br>Target<br>2026 | Target<br>Renstra<br>2029 | %<br>Capaian<br>TW I<br>thd<br>Target<br>Akhir<br>Renstra |
| -                                                                                                            | -            | -            | -            | -            | 78                      | Periode Pengukuran Tahunan |                           |                                                 |                                         | 81                        | -                                                         |

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, realisasi atas capaian indikator belum dapat diperoleh karena periode pengukuran indikator yang bersifat tahunan serta Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milih Daerah Tahun 2025 Berdasarkan Efisiensi Anggaran baru ditetapkan dan berlaku per 21 Maret 2025.

#### Q. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan

secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**Tabel 20.** Capaian IK “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap”

| Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap |           |           |           |           |                   |                            |                     |                                  |                             |                     |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| IK 17 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap                                           |           |           |           |           |                   |                            |                     |                                  |                             |                     |                                         |
| Realisasi TW I Tahun 2021-2025                                                                               |           |           |           |           | Realisasi 2026    |                            |                     |                                  |                             | Renstra DJPT        |                                         |
| TW I 2021                                                                                                    | TW I 2022 | TW I 2023 | TW I 2024 | TW I 2025 | Target Tahun 2026 | Target TW I 2026           | Realisasi TW I 2026 | % Realisasi thd Target TW I 2026 | % Realisasi thd Target 2026 | Target Renstra 2029 | % Capaian TW I thd Target Akhir Renstra |
| -                                                                                                            | -         | -         | -         | -         | 81                | Periode Pengukuran Tahunan |                     |                                  |                             | 84                  | -                                       |

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, realisasi atas capaian indikator belum dapat diperoleh karena periode pengukuran indikator yang bersifat tahunan. Adapun kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan I dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah peningkatan kapasitas SDM kearsipan melalui partisipasi pada bimbingan teknis pendalaman materi pengawasan kearsipan tahun 2026 lingkup KKP, pemusnahan arsip di PPS Nizam Zachman dan PPN Brondong, serta pemantauan pengawasan kearsipan melalui SIKN.

## R. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. IKPA digunakan untuk mendukung beberapa hal diantaranya (1) mendukung belanja berkualitas dengan penguatan value for money dalam penilaian kinerja, (2) mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja, dan (3) penetapan derajat kewajaran (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan tingkat Kementerian/Lembaga. IKPA terdiri dari 8 (delapan) indikator yang mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran yaitu (1) Revisi DIPA, (2) Deviasi Halaman III DIPA, (3) Penyerapan Anggaran, (4) Belanja Kontraktual, (5) Penyelesaian Tagihan, (6) Pengelolaan UP dan TUP, (7) Dispensasi SPM, dan (8) Capaian Output.

Dasar hukum penilaian IKPA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-5/PB/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga. Selain peraturan di atas, terdapat ketentuan lanjutan yaitu Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Nomor S-72/PB.2/2025 tanggal 14 Maret 2025 perihal Pelaporan Data

Target/Proyeksi dan Realisasi Capaian Output Tahun Anggaran 2025 pada Aplikasi SAKTI dan OM SPAN.

**Tabel 21.** Capaian IK “Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap”

| Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap |           |           |           |           |                   |                               |                     |                                  |                             |                     |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| IK 18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap                                        |           |           |           |           |                   |                               |                     |                                  |                             |                     |                                         |
| Realisasi TW I Tahun 2021-2025                                                                               |           |           |           |           | Realisasi 2026    |                               |                     |                                  |                             | Renstra DJPT        |                                         |
| TW I 2021                                                                                                    | TW I 2022 | TW I 2023 | TW I 2024 | TW I 2025 | Target Tahun 2026 | Target TW I 2026              | Realisasi TW I 2026 | % Realisasi thd Target TW I 2026 | % Realisasi thd Target 2026 | Target Renstra 2029 | % Capaian TW I thd Target Akhir Renstra |
| -                                                                                                            | -         | -         | -         | -         | 92                | Periode Pengukuran Semesteran |                     |                                  |                             | 95                  | -                                       |

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, realisasi atas capaian indikator belum dapat diperoleh karena periode pengukuran indikator yang bersifat semesteran. Untuk meningkatkan capaian IKPA, setiap unit kerja memiliki kewajiban untuk melakukan Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dengan harapan nilai capaian IKPA DJPT tahun 2026 dapat mencapai target dan lebih baik dari nilai capaian IKPA DJPT tahun 2025.

#### S. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Salah satu pelaksanaan dari UU Nomor 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya pemantauan dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa monev keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Adapun penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2023.

**Tabel 22.** Capaian IK “Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap”

| Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap |           |           |           |           |                   |                            |                     |                                  |                             |                     |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| IK 19 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap                                            |           |           |           |           |                   |                            |                     |                                  |                             |                     |                                         |
| Realisasi TW I Tahun 2021-2025                                                                               |           |           |           |           | Realisasi 2026    |                            |                     |                                  |                             | Renstra DJPT        |                                         |
| TW I 2021                                                                                                    | TW I 2022 | TW I 2023 | TW I 2024 | TW I 2025 | Target Tahun 2026 | Target TW I 2026           | Realisasi TW I 2026 | % Realisasi thd Target TW I 2026 | % Realisasi thd Target 2026 | Target Renstra 2029 | % Capaian TW I thd Target Akhir Renstra |
| -                                                                                                            | -         | -         | -         | -         | 92                | Periode Pengukuran Tahunan |                     |                                  |                             | 95                  | -                                       |

Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi 5 komponen indikator yaitu: 1) mengumumkan informasi publik, 2) menyediakan informasi publik, 3) sarana dan

prasarana, 4) kelembagaan, dan (5) digitalisasi. Sampai dengan triwulan I tahun 2026, realisasi atas capaian indikator belum dapat diperoleh karena periode pengukuran indikator yang bersifat tahunan. Kegiatan yang sudah dilakukan dalam mendukung pencapaian atau realisasi indikator kinerja pada triwulan I antara lain:

- 1) penyusunan surat tugas tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap; dan
- 2) pemutakhiran informasi di laman website Ditjen Perikanan Tangkap.

#### T. Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Pembangunan integritas merupakan upaya dalam mewujudkan pegawai aparatur sipil negara yang memiliki integritas tinggi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Indikator kinerja ini dinilai untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap dengan fokus pada pembangunan sistem antikorupsi yang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Nilai Pembangunan Integritas diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, meliputi: 1) pembangunan zona integritas (bobot 30%); 2) program pengendalian gratifikasi (bobot 15%); 3) penanganan pengaduan masyarakat dan *Whistle Blower System* (bobot 15%); 4) penanganan benturan kepentingan (bobot 15%); 5) pelaporan harta kekayaan (bobot 15%); dan 5) pengendalian kecurangan (bobot 10%).

**Tabel 23.** Capaian IK “Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap”

| Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap |           |           |           |           |                   |                            |                     |                                  |                             |                     |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| IK 20 Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap                                                  |           |           |           |           |                   |                            |                     |                                  |                             |                     |                                         |
| Realisasi TW I Tahun 2021-2025                                                                               |           |           |           |           | Realisasi 2026    |                            |                     |                                  |                             | Renstra DJPT        |                                         |
| TW I 2021                                                                                                    | TW I 2022 | TW I 2023 | TW I 2024 | TW I 2025 | Target Tahun 2026 | Target TW I 2026           | Realisasi TW I 2026 | % Realisasi thd Target TW I 2026 | % Realisasi thd Target 2026 | Target Renstra 2029 | % Capaian TW I thd Target Akhir Renstra |
| -                                                                                                            | -         | -         | -         | -         | 81                | Periode Pengukuran Tahunan |                     |                                  |                             | 84                  | -                                       |

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, realisasi atas capaian indikator belum dapat diperoleh karena periode pengukuran indikator yang bersifat tahunan. Adapun kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung capaian indikator ini antara lain:

- 1) pengusulan calon unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi ke Inspektorat Jenderal KKP; dan
- 2) penyusunan rancangan Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap terkait Unit Pengendalian Gratifikasi, Penanganan Benturan Kepentingan, Agen Perubahan, Tim Pembangunan Zona Integritas.

#### U. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Proses Bisnis (Probis) adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan

mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana, dan oleh siapa dilakukan. Probis Ditjen Perikanan Tangkap terdiri atas: Probis Level 1, Probis Level 2, dan Probis Level 3. Penyusunan SOP berdasarkan Probis Level 3. Indikator kinerja ini mengukur capaian kinerja Ditjen Perikanan Tangkap dalam penyelesaian Probis Level 2 dan Level 3 serta SOP.

**Tabel 24.** Capaian IK “Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap”

| Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap |           |           |           |           |                   |                            |                     |                                  |                             |                     |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| IK 21 Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)        |           |           |           |           |                   |                            |                     |                                  |                             |                     |                                         |
| Realisasi TW I Tahun 2021-2025                                                                               |           |           |           |           | Realisasi 2026    |                            |                     |                                  |                             | Renstra DJPT        |                                         |
| TW I 2021                                                                                                    | TW I 2022 | TW I 2023 | TW I 2024 | TW I 2025 | Target Tahun 2026 | Target TW I 2026           | Realisasi TW I 2026 | % Realisasi thd Target TW I 2026 | % Realisasi thd Target 2026 | Target Renstra 2029 | % Capaian TW I thd Target Akhir Renstra |
| -                                                                                                            | -         | -         | -         | -         | 66                | Periode Pengukuran Tahunan |                     |                                  |                             | 69                  | -                                       |

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, realisasi atas capaian indikator belum dapat diperoleh karena periode pengukuran indikator yang bersifat tahunan. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan pada triwulan I untuk mendukung capaian indikator kinerja ini, yaitu penyusunan uraian tugas dari setiap unit kerja lingkup pusat berdasarkan kewajiban yang tercantum pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasal 354.

### 3.3. Serapan Anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap

Penyerapan anggaran merupakan kemampuan satker dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan, dimana penyerapan anggaran satker merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing bagian. Nilai perhitungan persentase penyerapan anggaran lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap didapatkan berdasarkan persentase dari besarnya realisasi anggaran dibandingkan dengan besarnya pagu satker.

Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2026 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp80.279.111.000,- dimana pagu alokasi anggaran tersebut sebesar Rp54.589.316.000,- digunakan untuk belanja pegawai, Rp25.672.036.000,- untuk belanja barang, dan Rp17.759.000,- untuk belanja modal. Adapun realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2026 adalah sebesar Rp32.769.043.602,- atau mencapai 40,82%.

**Tabel 25.** Alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja

| No.          | Jenis Belanja   | Anggaran (Rp)         | Realisasi Anggaran (Rp) | %            |
|--------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 1            | Belanja Pegawai | 54.589.316.000        | 25.662.209.723          | 47,01        |
| 2            | Belanja Barang  | 25.672.036.000        | 7.106.833.879           | 27,68        |
| 3            | Belanja Modal   | 17.759.000            | -                       | -            |
| <b>TOTAL</b> |                 | <b>80.279.111.000</b> | <b>32.769.043.602</b>   | <b>40,82</b> |

## **BAB IV. PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap triwulan I tahun 2026 menyajikan capaian Indikator Kinerja selama triwulan I tahun 2026. Terhadap capaian indikator kinerja tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan.

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, pencapaian indikator kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap adalah sebesar 102,99%. Berdasarkan target pada dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2026, dari total 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja (IK), terdapat 5 (lima) IK yang telah memiliki capaian, 1 (satu) indikator kinerja masuk dalam kategori “Istimewa”. 3 (tiga) indikator kinerja masuk dalam kategori “Baik”, dan 1 (satu) indikator masuk dalam kategori “Cukup”.

Beberapa indikator kinerja belum memiliki capaian pada triwulan I dikarenakan periode pengukuran yang bersifat semesteran atau tahunan. Oleh karena itu, pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi fokus utama dalam melaksanakan kegiatan pada triwulan berikutnya. Dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap diharapkan pada triwulan selanjutnya dapat melaksanakan rencana aksi diantaranya adalah:

- 1) melakukan langkah percepatan terhadap indikator kinerja yang akan dihitung pada triwulan II (semester I); dan
- 2) terhadap indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap yang saat ini capaiannya belum 100%, perlu dilakukan koordinasi dengan unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam rangka pemantauan untuk melengkapi tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan sampai tuntas.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap triwulan I tahun 2026 ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap kepada Dirjen Perikanan Tangkap, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.

# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [djpt@kkp.go.id](mailto:djpt@kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ridwan Mulyana**

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Januari 2026

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



**Lotharia Latif**

Pihak Pertama  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Perikanan Tangkap



**Ridwan Mulyana**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

| NO | SASARAN KEGIATAN                                                                           | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                                                                      | TARGET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap | 1                          | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                                                  | 81,75  |
|    |                                                                                            | 2                          | Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)                                                         | 84,5   |
|    |                                                                                            | 3                          | Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                                                             | 88,2   |
|    |                                                                                            | 4                          | Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Tangkap (persen)                        | 82     |
|    |                                                                                            | 5                          | Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                                                | 3,6    |
|    |                                                                                            | 6                          | Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Tangkap (persen)                    | 77     |
|    |                                                                                            | 7                          | Persentase Pengelolaan BMN Ditjen Perikanan Tangkap (persen)                                                         | 82     |
|    |                                                                                            | 8                          | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Tangkap (persen)                                                 | 90     |
|    |                                                                                            | 9                          | Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Bidang Perikanan Tangkap (persen)                                                  | 83     |
|    |                                                                                            | 10                         | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Tangkap (persen)  | 86     |
|    |                                                                                            | 11                         | Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Ditjen Perikanan Tangkap (persen)              | ≤ 0,5  |
|    |                                                                                            | 12                         | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                                                    | 88,8   |
|    |                                                                                            | 13                         | Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap (persen)                                               | 100    |
|    |                                                                                            | 14                         | Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri bidang Perikanan Tangkap (persen) | 100    |

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                                                 | TARGET |
|----|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                  | 15                         | Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)                 | 100    |
|    |                  | 16                         | Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                        | 78     |
|    |                  | 17                         | Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                            | 81     |
|    |                  | 18                         | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                   | 92,10  |
|    |                  | 19                         | Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                             | 92     |
|    |                  | 20                         | Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)                                   | 77     |
|    |                  | 21                         | Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Tangkap (persen) | 66     |

**Data Anggaran:**

| NO                                                                    | KEGIATAN                                                     | ANGGARAN (Rp)         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                                                                    | Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap | 80.461.956.000        |
| <b>Total Anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2026</b> |                                                              | <b>80.461.956.000</b> |

Jakarta, 14 Januari 2026

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

  
Lotharia Latif

Pihak Pertama  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Perikanan Tangkap

  
Ridwan Mulyana